



**Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama**

**P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574**

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 19, Nomor 2, Juli - Desember, 2024

DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/al-adyan.v19i2.24856>

---

## **SINERGITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA SADAR KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DESA LUMBIREJO DAN DESA PONCOKRESNO NEGERI KATON PESAWARAN LAMPUNG**

**Idrus Ruslan**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[idrus.ruslan@radenintan.ac.id](mailto:idrus.ruslan@radenintan.ac.id)

**Ellya Rosana**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[ellyarosana@radenintan.ac.id](mailto:ellyarosana@radenintan.ac.id)

### ***Abstract***

*Diversity is a characteristic and treasure of the Indonesian nation. Religious differences are like a double-edged knife, one side is wealth and the other can trigger conflict in people's lives. As a large and diverse nation, we must be able to manage existing diversity in order to sustain harmonious social life. This research displays the synergy between the government and society in creating a village aware of religious harmony in Lumbirejo Village and Poncokresno Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency. This research uses a qualitative approach. In collecting data, researchers conducted interviews and observations in the field and in book literature, scientific journal articles and other written sources. The results of this research show that in creating a village aware of religious harmony, the Lumbirejo Village and Poncokresno Village Governments are synergizing with the Pesawaran FKUB, Pesawaran Ministry of Religion, Pesawaran Regency Government, TNI and Polri. The supporting factors are; First, an understanding of society that is aware of differences, tolerant and united is the main capital for realizing a harmonious society; Second, synergy between government and society. The next obstacle factors in realizing a harmonious conscious village are: First, political interests; Second, social media content that contains SARA has a bad influence on young people; Third, the lack of government operational assistance to FKUB Pesawaran as a means of realizing a village that is aware of religious harmony has therefore not been maximized.*

## Abstrak

*Keragaman merupakan ciri khas dan khazanah bangsa Indonesia. Perbedaan agama bagaikan pisau bermata ganda, satu sisi merupakan kekayaan disatu sisi dapat memicu terjadinya konflik ditengah kehidupan masyarakat. Sebagai bangsa yang besar dan memiliki keragaman haruslah mampu mengelola kebhinekaan yang ada guna keberlanjutan kehidupan masyarakat yang harmoni. Penelitian ini menampilkan Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dan observasi di lapangan dan literature buku, artikel jurnal ilmiah dan sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan desa sadar kerukunan umat beragama Pemerintah Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno melakukan sinergi dengan FKUB Pesawaran, Kemenag Pesawaran, Pemkab Pesawaran, TNI dan Polri. Adapun faktor pendukungnya yaitu; Pertama, pemahaman masyarakat yang sadar akan perbedaan, toleran, kompak menjadi modal utama terwujudnya masyarakat yang rukun; Kedua, Sinergitas antar pemerintah dan masyarakat. Sedangkan faktor kendala dalam mewujudkan desa sadar kerukunan yaitu: Pertama, kepentingan politik; Kedua, konten media sosial yang memuat SARA berpengaruh buruk bagi anak muda; Ketiga, kurangnya bantuan operasional pemerintah kepada FKUB Pesawaran sebagai sarana mewujudkan desa sadar kerukunan umat beragama sehingga belum maksimal.*

**Kata Kunci:** *Kerukunan Antar Umat Beragama, Desa Sadar Kerukunan, Moderasi Beragama*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan komposisi etnis, budaya, adat istiadat yang sangat beragam, begitu juga dengan agama, aliran kepercayaan, ras, bahasa, adat istiadat, bahasa, serta pandangan hidupnya. Keberagaman di Indonesia tercermin dari semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam Pancasila yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Agama-agama besar yakni Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu hidup di negeri ini, hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang majemuk. Kemudian, bentuk negara kepulauan juga menyebabkan pengamalan, dan penghayatan keagamaan bangsa ini menarik sekaligus unik dibandingkan dengan bangsa lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Irfan Riyadi dan Basuki, *Membangun Inklusivisme Pabam Keagamaan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 1-3.

Keberagaman masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Adanya keberagaman justru dapat melengkapi satu sama lain, seperti halnya pelangi yang terlihat indah karena terdiri dari bermacam-macam warna. Namun demikian, kasus di beberapa daerah di Indonesia, terjadinya konflik justru dipicu oleh perbedaan yang ada seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah misalnya konflik yang pernah terjadi di Poso, Ambon, Situbondo, Tasikmalaya, Sampit<sup>2</sup> dan konflik pendirian rumah ibadah di berbagai daerah juga masih terus terjadi hingga saat ini.<sup>3</sup>

Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera yang terdiri dari penduduk yang heterogen. Provinsi Lampung selain dihuni oleh suku pribumi asli Lampung (*Pepadun* dan *Sai Batin*)<sup>4</sup> juga dihuni berbagai suku seperti Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Ogan, Bugis, Padang dan banyak lagi.<sup>5</sup> Bahkan, suku pendatang lebih mendominasi di Lampung, sebut saja suku Jawa yang hampir persebarannya terdapat di tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Adapun heterogenitas masyarakat Provinsi Lampung salah satunya disebabkan oleh proses transmigrasi yang terjadi di era kolonialisasi Belanda pada tahun 1905.<sup>6</sup>

Potensi keragaman baik keragaman budaya maupun agama yang ada di Provinsi Lampung haruslah dikelola dengan baik dan secara berkesinambungan dalam menanamkan nilai toleransi, sikap inklusif, gotong royong atau yang disebut dengan moderasi beragama agar masyarakat dapat hidup berdampingan, damai, dan rukun dalam perbedaan agar tidak terjadi konflik sebagaimana konflik-konflik yang

---

<sup>2</sup> Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 91.

<sup>3</sup> Idrus Ruslan, "Deconstruction of the Policy for the Establishment of Houses of Worship in Indonesia," *Religion: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 6, no. 2 (2022): 261–270.

<sup>4</sup> Idrus Ruslan dan Muhammad Aqil Irham, "The Role of Cultural Literacy and Peace Education in Harmonization of Religious Communities," *Journal of Social Studies Educational Research* 13, no. 3 (2022): 174–204.

<sup>5</sup> Muhammad Candra Syahputra, "Pendidikan Multikultural dalam Budaya Nemui Nyimah," *eL-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020), 81-97.

<sup>6</sup> Patrice Levang, *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), 9-10.

telah disebutkan di atas. Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno merupakan dua dari banyaknya desa di Lampung yang penduduknya terdiri dari beragam suku dan agama. Bahkan, kedua desa tersebut ditetapkan sebagai desa sadar FKUB Pesawaran. Adapun agama yang dianut penduduk Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindhu, dan Budha. Kedua desa tersebut terletak di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Adapun pekerjaan penduduknya yaitu sebagai petani, pedagang, karyawan swasta dan PNS.<sup>7</sup>

Sinergitas pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan desa sadar kerukunan sebagaimana dijelaskan oleh bapak Sobirin Selaku Kepala Desa Lumbirejo “Masyarakat desa Lumbirejo sangat beragam, baik suku maupun agama, kami menjalin kerjasama dengan FKUB Pesawaran agar sering dilakukan dialog antar umat beragama di desa kami, bahkan Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan. Kemudian FKUB Pesawaran juga bekerjasama dengan BPN untuk mensertifikatkan rumah-rumah ibadah semua agama, kami juga selalu berkoordinasi dengan Kemenag Pesawaran untuk diberikan penyuluhan moderasi beragama, kemudian dalam mengadakan sarasehan kerukunan baik di Desa Lumbirejo maupun Desa Poncokresno Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo juga sangat mendukung demi terwujudnya kerukunan beragama, dan pihak kepolisian juga siap untuk membangun komunikasi langsung ke lapangan untuk menjaga keamanan”.<sup>8</sup>

Berikutnya, Bapak Mujahidin selaku Kepala Desa Poncokresno menyebutkan “Desa Poncokresno terdiri dari dari banyak suku dan agama namun hidup berdampingan menjalin tali persaudaraan yang kuat, Desa Poncokresno dan Desa Lumbirejo menjadi Desa Sadar Kerukunan. Bahkan, Desa Poncokresno dipilih oleh Koramil 421-02 Gedong Tataan sebagai Kampung Pancasila, Kampung Pancasila merupakan julukan untuk desa yang dijadikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Adapun ditetapkannya Desa

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sobirin (Kepala Desa Lumbirejo) dan Mujahidin (Kepala Desa Poncokresno) saat pra penelitian 28 September 2022.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sobirin (Kepala Desa Lumbirejo) saat pra penelitian 28 September 2022.

Poncokresno menjadi Desa Sadar Kerukunan tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat kami yang memiliki toleransi tinggi, punya semangat gotong royong dan tentunya didukung oleh pihak pemerintah seperti FKUB Pesawaran yang hampir setiap tahun melaksanakan kegiatan sarasehan antar umat beragama di desa kami, Kemenag Pesawaran yang selalu memberikan penyuluhan, Polres Pesawaran dan TNI yang selalu menjaga keamanan di desa kami, dan Bapak Bupati yang senantiasa memberikan dukungan melalui dinas-dinas terkait dalam menciptakan desa yang rukun”.<sup>9</sup>

Ditetapkannya Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno sebagai desa sadar kerukunan tentu menjadikan dua desa tersebut menjadi desa percontohan bagi seluruh desa-desa yang ada di Lampung sebagai desa yang mampu mengelola keragaman dengan baik sehingga terciptanya masyarakat yang rukun. Pemerintah Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno melibatkan *stake holder* untuk bersinergi mewujudkan desa sadar kerukunan antara lain Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, FKUB Kabupaten Pesawaran, serta TNI dan Polri.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan sikap toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang rukun sesungguhnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat dengan melakukan sinergitas satu sama lain. Desa sadar kerukunan di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno agar dapat dikembangkan menjadi *role model* desa sadar kerukunan bagi pemerintah desa Indonesia khususnya di provinsi Lampung dalam menciptakan masyarakat desa yang rukun, aman, tentram dan harmonis.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Mujahidin (Kepala Desa Poncokresno) saat pra penelitian 28 September 2022.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

metode penelitian studi kasus (*case study*), hal ini dikarenakan metode studi kasus merupakan metode yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan penjelasan yang mendalam dideskripsikan dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan (*fact finding*).<sup>11</sup>

Adapun dalam pengambilan data peneliti melakukan wawancara kepada pemerintah Desa Lumbirejo, Desa Poncokresno, FKUB Pesawaran, Kemenag Pesawaran, TNI dan Polri dengan dilengkapi sumber data berupa dokumen, artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian dengan menghubungkan berbagai data, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas, akurat dan faktual sesuai dengan fokus penelitian.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Di era globalisasi, segala sesuatu dapat dengan cepat berubah. Apalagi saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang disebut sebagai era disrupsi, hampir semua kebiasaan hidup manusia telah terdisrupsi yang disebabkan oleh majunya perkembangan teknologi internet, terlebih saat mewabahnya COVID-19 mempercepat proses disrupsi dalam segala lini kehidupan. Arus globalisasi telah berkontribusi dalam pengembangan ilmu, dan teknologi menghantarkan manusia, ke dalam sebuah peradaban yang baru. Globalisasi diibaratkan pisau bermata ganda, disisi lain memberikan manfaat dan peluang untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran suatu negara atau suatu komunitas masyarakat pada tataran lokal. Namun, disisi lainnya globalisasi dapat menimbulkan malapetaka atau musibah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4-5.

<sup>12</sup> Eni Setyowati, "Hijrah Menuju Sehat yang Islami," in *Moderasi Beragama: Perubahan Orientasi Keberagamaan Umat Islam Indonesia*, ed. Abd. Azis Tata Pangarsa (Gresik: Sahabat Pena Kita, 2020), 87.

Adapun malapetaka yang meruncing disebabkan oleh globalisasi salah satunya adalah hubungan antarumat beragama. Dapat kita saksikan di berbagai platform media sosial dapat dengan mudah kita menemukan informasi atau konten memuat isu SARA dan bermuatan hoax yang cenderung membenturkan satu agama dengan agama lainnya, satu suku dengan suku lainnya. Terlebih pada perhelatan Pilpres 2019 lalu,<sup>13</sup> hajatan akbar demokrasi Indonesia diwarnai isu agama atau politisasi agama di ruang publik digital.<sup>14</sup>

Sebelum berkembang pesatnya teknologi internet, secara general hubungan antarumat beragama di Indonesia berjalan dengan baik hampir di semua daerah di Indonesia, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terlihat beberapa permasalahan. Beberapa tahun belakangan ini, khususnya Pasca Reformasi pada 1998 terdapat sumber-sumber yang menjadi celah sehingga terjadi ketegangan hubungan antarumat beragama dan tidak jarang peristiwa tersebut berubah menjadi konflik kekerasan. Dalam skala yang besar kekerasan komunal yang melibatkan komunitas-komunitas beda agama, seperti halnya di sekitar tahun 1998 terdapat beberapa kasus. Namun demikian, saat ini dua jenis yang sering muncul adalah kasus persoalan wacana penyesatan, dan rumah ibadah, baik terhadap kelompok-kelompok keagamaan baru maupun kelompok dalam satu agama. Ketegangan-ketegangan yang terjadi tersebut dalam banyak kasus ternyata dapat mengarah pada penggunaan kekerasan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.<sup>15</sup>

Adapun konflik-konflik agama yang terjadi baik dalam masyarakat maupun polarisasi di media sosial merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan, apabila berlarut-larut akan menimbulkan gelombang konflik yang lebih besar dan berdampak pada tidak harmonisnya kehidupan antarumat beragama. Perlu dipahami bahwa, sesungguhnya isu SARA seringkali dimainkan oleh kelompok tertentu yang tidak menghendaki Pancasila sebagai ideologi

---

<sup>13</sup> Idrus Ruslan dan Kiki Muhammad Hakiki, "Politik Identitas dan Tantangan Hubungan Antar Agama di Indonesia," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 17, no. 2 (2022): 201–222.

<sup>14</sup> Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme," *Politica* 11, no. 1 (2020), 43-63.

<sup>15</sup> Zainal Abidin Bagir et al., *Pluralisme Kewargaan: Arab Baru Politik Keragaman di Indonesia* (Bandung: CRCS UGM dan Mizan, 2011), 12.

bangsa, sebut saja kelompok-kelompok radikal dan trans-nasional yang berkedok agama dalam gerakannya.

Gerakan radikal-transnasional adalah kelompok yang anti budaya, anti Pancasila. Adapun organisasi masyarakat yang tetap eksis di garda terdepan sebagai benteng NKRI adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU memainkan peran sebagai organisasi Islam yang berwatak *Islam wasathiyah*,<sup>16</sup> sebagaimana juga yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Fuad Fachruddin dalam Abdul Mu'ti dkk menyebutkan bahwa NU maupun Muhammadiyah memahami pluralisme sebagai memberi kesempatan atau penghargaan kepada pemeluk agama lain untuk hidup saling berdampingan secara aman, damai sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang harmoni.<sup>17</sup>

Moderasi beragama sejatinya merupakan gagasan-gagasan sentral tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah sejak dahulu yang kemudian dirumuskan menjadi terminologi baru oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai gagasan untuk menciptakan generasi masadepan bangsa yang moderat dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Korelasi Pancasila dengan moderasi beragama dapat diibaratkan hubungan tumbuhan dengan mata air. Pancasila diibaratkan mata airnya, dan moderasi beragama diibaratkan tumbuhan yang beragam yang hidup karena berkah air yang bersumber pada mata air tersebut. Pancasila lahir dari air murni budaya religius Indonesia dengan burung garuda sebagai lambangnya dan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* berbeda-beda tetapi tetap satu dalam pita yang tercengkeram kuat di kakinya.<sup>18</sup>

Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno merupakan dua desa yang terletak di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Kedua desa ini memiliki masyarakat yang multiagama dan saat ini menjadi desa percontohan dalam membina dan membangun kerukunan antar umat beragama. Di tengah

---

<sup>16</sup> M. Alfazri, "Moderasi Agama Nahdlatul 'Ulama di Era Global," *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 1 (2021), 49.

<sup>17</sup> Abdul Mu'ti dan Azaki Khoiruddin, *Pluralisme Positif: Konsep dan Implementasi dalam Pendidikan Muhammadiyah* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 21.

<sup>18</sup> Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 56.

kemajuan teknologi yang serba terbuka, banyaknya hoax, dakwah yang ekstrem disebarkan di media sosial, konten bermuatan SARA seringkali menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan antar kelompok, karena itu menjadi penting untuk merefleksikan bagaimana kedua desa tersebut bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antar umat beragama agar memberikan inspirasi bagi umat beragama di Indonesia.

### **Kondisi Kehidupan Antarumat Beragama di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno**

Desa Lumbirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Di desa Lumbirejo masyarakatnya sangat heterogen terdiri dari masyarakat yang berbeda suku, dan agama. Namun demikian, perbedaan masyarakat dalam menganut agama tidak membuat mereka menjadi masyarakat yang terkotak-kotak atau berkelompok-kelompok, justru perbedaan agama yang dianut menjadi perekat masyarakat desa Lumbirejo, dan membuat mereka menjadi saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Hal inilah yang membuat desa Lumbirejo menjadi salah satu desa di Provinsi Lampung sebagai desa percontohan dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Sebagaimana diungkapkan Bapak Ridho selaku Kepala Desa Lumbirejo sebagai berikut:

*Seperti bulan ramadhan umat Islam satu bulan penuh ada pelaksanaan shalat tarawih, saya selaku Kepala Desa membuat surat tertulis dan tembusan ke masing-masing ketua umat non-muslim perihal untuk bantuan dan partisipasinya dalam menjaga keamanan, seperti parkir motor dan hal lain supaya kondusif tidak ada hal-hal yang negatif terjadi. Setelah saya berikan surat untuk partisipasi, mereka umat non-muslim membagi tugas di 12 titik rumah ibadah (6 Masjid dan 6 Mushola) di 7 dusun. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh mereka karena memang ya sudah seperti itu di Desa Lumbirejo. Hal tersebut juga sebaliknya, jika ada peringatan hari besar atau hari raya umat non-muslim maka kami pibak desa juga memberikan surat edaran kepada tokoh agama Islam untuk partisipasi menjaga keamanan di tempat ibadah mereka. Saya juga minta kerjasama kepada NU seperti Banser dan Pagar Nusa untuk*

*pengamanan, selain itu mitra kita dalam pengamanan juga dari Babinsa dan Bhabinkamtibnas karena setiap desa harus ada. Untuk tempat ibadah di Desa Poncokresno itu Gereja Katolik ada 1 Gereja Santo Yohanes, Gereja Kristen ada 2 karena Kristen disini ada 2 golongan yakni Kristen Kerasulan Baru dan Kristen Advent.<sup>19</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat muncul secara organik dalam mewujudkan suasana kehidupan yang harmoni dan damai. Pemahaman yang moderat di desa ini seperti halnya kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun<sup>20</sup> oleh para pendahulu di desa ini. Tidak mencampuri urusan agama lain, memahami bahwa kebebasan agama merupakan Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup> Sehingga, rasa saling melindungi satu sama lain menjadi suatu keharusan dan penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Masyarakat yang seperti dapat dikatakan sebagai masyarakat yang betul-betul menghayati semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman Pihak Desa Lumbirejo juga melibatkan Ormas Keagamaan Nahdlatul Ulama, sebagai salah satu ormas yang memiliki paham moderat atau *tawasuth*.<sup>22</sup>

Pak Ridho juga mengemukakan:

*Masyarakat desa Lumbirejo ini bermacam-macam suku, mayoritas suku Jawa dahulu ini berasal dari daerah Gombong Jawa Tengah, kemudian Sunda, Lampung, Batak, Cina juga ada. Untuk penganut agama disini ada Islam, Kristen Katolik, Budha.<sup>23</sup>*

---

<sup>19</sup> Ridho (Kepala Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

<sup>20</sup> Sumper Mulia Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Darwis Harahap, "Tracing The Dynamic Spectrum of Religious Moderation in The Local Custom of North Sumatera," *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (2023): 65–102.

<sup>21</sup> Victorio H Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 57–68.

<sup>22</sup> Masdar Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism?: A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU," *Journal of Indonesian Islam* 07, no. 01 (2013): 24–48.

<sup>23</sup> Ridho (Kepala Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

Selain masyarakat yang berbeda-beda dalam menganut agama, di Desa Lumbirejo juga masyarakatnya sangat multikultural, suku yang berbeda-beda hidup di dalam satu desa. Namun demikian, dalam sejarahnya di Desa Lumbirejo pernah terjadi konflik antarumat beragama sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ridho selaku Kepala Desa:

*Dulu pada tahun 2014 pernah terjadi konflik antara umat Katolik dan umat Islam, tetapi itu hanya segelintir kelompok tidak seluruhnya. Akan tetapi, hal ini dapat dengan cepat memancing emosional yang lainnya sehingga perlu tindakan cepat, hingga pemerintah kabupaten juga turun termasuk FKUB dan Polres, akhirnya dilakukan mediasi, Alhamdulillah bisa kondusif kembali. Setelah itu hingga saat ini tidak ada kasus yang serupa, kita betul-betul menjaga agar tidak terulang kasus yang sama.<sup>24</sup>*

Tahun 2014 lalu di desa Lumbirejo, menjadi evaluasi bagi pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten dalam membina dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Walaupun jika dikatakan hanya kasus kecil, namun ketegangan atas nama agama dapat dengan mudah memancing sentimen masyarakat. Setelah terjadinya kasus tersebut, hingga saat ini desa Lumbirejo tidak pernah terjadi konflik antarumat beragama sehingga ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan dengan tujuan agar mempertahankan kerukunan dan meningkatkannya, agar dapat menjadi percontohan desa yang lain khususnya di Kabupaten Pesawaran dan secara luas di Propinsi Lampung.

Selanjutnya yakni Desa Poncokresno, sebagai desa yang juga ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan. Desa Poncokresno memiliki masyarakat yang multietnis dan multiagama, keadaan masyarakat yang majemuk juga menjadikan desa Poncokresno menjadi salah satu desa percontohan dalam hal kerukunan antarumat beragama, sebab perbedaan yang ada justru menjadikan masyarakat desa Poncokresno menjadi masyarakat yang saling menghargai, dan menghormati satu sama lain.

---

<sup>24</sup> Ridho (Kepala Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

Sekretaris Desa Poncokresno (Bapak Irwan) memberikan eksplorasi bahwa:

*Salah satu bukti juga bahwa masyarakat kita disini sangat toleran juga tercermin dalam pembagian jabatan struktural desa, yang tidak hanya diisi oleh penganut agama tertentu atau suku tertentu. Di kantor desa ini macam-macam, tidak hanya muslim saja atau Jawa saja. Bahkan, kepala desa saat ini Ibu Mariani Hasibuan adalah orang Batak.<sup>25</sup>*

Hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa, toleransi atau penghargaan terhadap penganut agama lain bukan hanya dalam kehidupan sosial-masyarakat tetapi juga pihak desa sangat adil dalam melibatkan semua penganut agama untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan Desa Poncokresno. Sehingga, dalam pelaksanaan tugas-tugas desa dapat secara penuh menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari 5 penganut agama tersebut. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat desa Poncokresno disebutkan oleh Bapak Irwan sebagai berikut:

*Di desa kami ada penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Rumah Ibadah mereka juga di desa ini semua. Sejak berdirinya desa Poncokresno hingga saat ini, Alhamdulillah tidak ada konflik. Bahkan disini itu rumah penduduknya tidak mengelompok warga muslim sebelahnya Kristen, Budha, Katolik akur. Jika ada acara tablilan umat Islam, umat agama yang lain diundang semua begitu sebaliknya. Hal itu sudah jadi tradisi turun temurun, tidak ada gesekan dan menjelekkkan agama lain itu tidak ada.<sup>26</sup>*

Sejak berdirinya Desa Poncokresno hingga saat ini tidak pernah ada gesekan atau konflik yang terjadi antarumat beragama. Mereka hidup secara rukun dan mampu saling menjaga, dan menghargai satu sama lain. Selain itu, di Desa Poncokresno juga terdapat semua rumah Ibadah baik Masjid, Gereja Katolik maupun Kristen, Vihara, dan Pure. Pemandangan yang sangat sulit ditemui di

---

<sup>25</sup> Irwan (Sekretaris Desa Poncokresno), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

<sup>26</sup> Irwan (Sekretaris Desa Poncokresno), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

desa yang lain, sekaligus menegaskan bahwa warga masyarakat Desa Poncokresno sangat menghargai agama yang dianut oleh masing-masing penganutnya tanpa menjelekkan satu sama lainnya. Karena, dalam mendirikan rumah ibadah perlu adanya persetujuan masyarakat, banyak kasus ditemui di daerah lain bahwa ketika umat beragama ingin mendirikan rumah ibadah terhalang akibat tidak adanya persetujuan yang ditandatangani oleh masyarakat.<sup>27</sup>

*Pak Irwan juga mengungkapkan; Desa kami ini juga dipilih oleh Koramil 421-02 Gedong Tataan sebagai Desa Pancasila. Alasannya, karena desa kami ini berbeda-beda agama, suku, budaya tetapi tetap satu. Membuktikan bahwa masyarakat Desa Poncokresno betul-betul menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.*<sup>28</sup>

Pemerintah Desa Poncokresno juga mendapatkan apresiasi dengan dipilihnya Desa Poncokresno sebagai Desa Pancasila oleh Koramil 421-02 Gedong Tataan dikarenakan keberhasilan masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan. Dari berdirinya desa ini hingga saat ini tidak pernah tercatat adanya konflik antar agama. Sehingga, dengan dipilihnya sebagai Desa Pancasila dapat menjadi percontohan desa yang lain dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni.

#### **a. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno**

Kehidupan masyarakat di Indonesia yang majemuk sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika tentu menjadi ciri khas sekaligus khazanah tersendiri bagi Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, perbedaan yang ada ibarat pisau bermata ganda, satu sisi menguntungkan dan disisi lain akan dapat merugikan apabila tidak dirawat. Untuk menuju masyarakat yang rukun, saling menghargai satu sama lain, hidup harmoni tentu perlu adanya ikhtiar bersama antar elemen masyarakat dengan pemerintah,

---

<sup>27</sup> Ruslan, "Deconstruction of the Policy for the Establishment of Houses of Worship in Indonesia." *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 6, no. 2 (2022): 261–270.

<sup>28</sup> Irwan (Sekretaris Desa Poncokresno), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

agar dapat terwujud menjadi daerah yang damai, aman, nyaman, dan rukun. Seperti halnya di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno, keduanya adalah desa yang terletak di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang telah ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan, penetapan desa sadar kerukunan tersebut melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Ridho selaku Kepala Desa Lumbirejo :

*Memang benar kami desa Lumbirejo ditunjuk sebagai desa sadar kerukunan antarumat beragama, yaitu desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno dari 144 desa di Pesawaran. Alhamdulillah kami dua desa yang berada di Kecamatan Negeri Katon dipilih sebagai desa yang sadar akan kerukunan antarumat beragama. Karena di desa kami ini agama yang dianut masyarakat berbeda-beda ada Islam, Katolik, Kristen, ada Budha yang tidak ada disini penganut agama Hindhu, yang memberikan Desa Sadar Kerukunan itu dari FKUB Pesawaran, jadi memang masyarakat di desa kami ini soal ibadah, keyakinan ya masing-masing, tidak ada agama lain ikut campur lakum dinukum wal yadin kalau di Islam. Walaupun begitu, secara kemanusiaan, secara sosial saling berpartisipasi bantu membantu.<sup>29</sup>*

Dipilihnya Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno sebagai desa sadar kerukunan oleh FKUB Pesawaran merupakan buah sinergi antar masyarakat dan pemerintah. Tentunya oleh stakeholher terkait. Dipilihnya dua desa tersebut tentunya bukan tanpa alasan, jika melihat penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Lumbirejo sangat toleran dengan penganut agama lain. Tidak ikut campur dengan urusan agama lain. Tetapi bukan berarti kemudian menimbulkan sikap yang apatis dan antipasti. Justeru, dalam kegiatan sosial masyarakat desa Lumbirejo saling bahu-membahu.

*Ditingkat kabupaten juga ada Forum Kerukunan Antar Umat beragama atau FKUB Pesawaran yang terdiri dari tokoh lintas agama, di desa juga kami punya wadah-wadah dakwah sendiri di masing-masing agama ini kita fasilitasi melalui pendanaan desa terkait kegiatan yang diselenggarakan. Kami merangkul semua, ya seperti ini Desa Lumbirejo dan Poncokresno kami juga ada prasasti tanggal 20*

---

<sup>29</sup> Ridho (Kepala Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

*Desember 2019 saat itu saya masih sekretaris desa, disitu kita diresmikan di kantor desa kami dan dihadiri Bapak Bupati Dendi Ramadhona untuk meresmikan Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno sebagai Desa Sadar Kerukunan, dan saat itu bapak Bupati juga berpesan agar kerukunan terus ditingkatkan dan dipertahankan agar dapat menjadi contoh bagi desa yang lain.<sup>30</sup>*

Telah dijelaskan sebelumnya sinergi antar masyarakat dan pemerintah menjadi syarat utama dalam mewujudkan desa sadar kerukunan. Kedua desa tersebut yakni Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno dipilih oleh FKUB Pesawaran sebagai desa sadar kerukunan pada 20 Desember 2019 lalu di Kantor Desa Lumbirejo. Kehadiran Bupati Pesawaran dalam peresmian Desa Sadar Kerukunan tersebut selain sebagai bentuk apresiasi juga membuktikan bahwa keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan masyarakat yang damai untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berperadaban. Sinergi mewujudkan masyarakat yang rukun juga terjalin dengan kementerian agama yang memberikan penyuluhan tentang pentingnya hidup damai ditengah perbedaan yang ada.

Sebagaimana tugas penyuluh agama memberikan edukasi kepada umat beragama untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, dan tentunya juga sejalan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.<sup>31</sup> Untuk itu, sudah menjadi tugas penyuluh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hidup rukun dan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu sinergi TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Lumbirejo, berikut hasil wawancara dengan Babinsa Negeri Katon:

*Saya selaku Babinsa yang bertugas di Desa Lumbirejo tentunya merasakan betul sinergi antara Kepala Desa, Pemerintah Kecamatan hingga Kabupaten, juga pihak Kemenag Pesawaran, FKUB Pesawaran, TNI dan Kepolisian dalam mewujudkan desa sadar*

---

<sup>30</sup> Ridho (Kepala Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

<sup>31</sup> Zikri Fachrul Nurhadi et al., "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Mensosialisasikan Moderasi Beragama," *Alhadharab: Jurnal Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2023): 63–79.

*kerukunan. Tugas kami yakni melaksanakan fungsi pembinaan, memberikan penyuluhan bidang pertahanan dan keamanan di desa. Tentu pertahanan dan keamanan ini memiliki pengaruh terhadap terwujudnya masyarakat yang rukun, bergotong-royong dan mampu hidup secara damai di tengah perbedaan.*<sup>32</sup>

Pernyataan Babinsa Desa Lumbirejo tersebut menunjukkan adanya sinergi antar masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan desa sadar kerukunan. Babinsa selalu pengamanan memiliki peran penting dan juga sangat sentral dalam hal tersebut. Karena, kerukunan tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama antar banyak pihak. Bintara Pembina Desa atau Babinsa merupakan pelaksana pembinaan territorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan.<sup>33</sup> Berikutnya, kami juga melakukan wawancara dengan Bhabinkamtibnas Desa Lumbirejo :

*Kami selalu dilibatkan dalam acara atau forum lintas agama di desa ini, kerukunan umat beragama juga menjadi tanggungjawab kami selaku Bhabinkamtibnas yang bertugas melakukan pembinaan dan menciptakan kondusifitas kehidupan masyarakat desa, tentunya tidak lepas dari kerjasama dengan aparat desa, dan para penyuluh agama dari Kemenag Pesawaran. Tugas kami melakukan patrol pengamanan di desa, kami juga selalu diminta Kapolres untuk nge-pam misalnya ada kegiatan keagamaan di gereja atau tempat ibadah yang lain, kemudian dalam beberapa kegiatan lintas agama juga pihak Polres hadir langsung ke Desa Lumbirejo.*<sup>34</sup>

Peran Polri dalam hal ini Bhabinkamtibnas didalam melakukan pengawasan desa sangatlah penting agar pembangunan, maupun kegiatan yang dilakukan di desa dapat berjalan secara optimal.<sup>35</sup> Pembangunan yang diawasi disini bukan hanya yang

---

<sup>32</sup> Serma Ricko Susanto (Babinsa Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

<sup>33</sup> Hayatul Khairul Rahmat et al., “Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): 91–107.

<sup>34</sup> Aipda Angga Areta (Bhabinkamtibnas Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

<sup>35</sup> M Asrul Aziz, “Revitalisasi Bhabinkamtibnas dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa,” *Jurnal Litbang Polri* 23, no. 1 (2020): 64–83.

bersifat fisik, tetapi pengawasan dalam bentuk pembangunan sumber daya manusianya. Sebagaimana di desa Lumbirejo SDM masyarakatnya yang toleran dan memahami akan perbedaan yang ada, dalam hal itu Bhabinkamtibnas tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan pihak terkait.

Sinergi antar masyarakat di Desa Poncokresno dalam mewujudkan desa sadar kerukunan sangatlah luarbiasa. Gotong-royong antar pemeluk agama dapat kita saksikan di desa ini. Bahkan, dalam perayaan hari besar agama tertentu maka penganut agama yang lain secara otomatis tergerak untuk membantu demi suksesnya ritual keagamaan tersebut sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketika pelaksanaan ibadah di hari raya, umat agama lain melakukan pengamanan juga bersedia menertibkan parker di halaman rumah ibadah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Waisak 2023 se-Kabupaten Pesawaran di Desa Poncokresno. Penganut agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindhu bersedia menjadi panitia yang mensukseskan gelaran hari raya Waisak tersebut.

Kesadaran akan kemajemukan ini tentunya perlu diapresiasi oleh pemerintah, sebagai bukti bahwa Desa Poncokresno layak disebut sebagai Indonesia Mini sebab masyarakatnya yang terdiri dari beragam suku maupun agama dapat hidup damai dan rukun. Masyarakat yang seperti ini terbentuk karena adanya tradisi turun temurun dari para pendahulunya, dan juga menyadari bahwa paham moderat atau lebih dikenal saat ini moderasi beragama adalah inti ajaran dari semua agama. Sehingga selain penghayatan yang dalam juga dilakukan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang moderat akan membawa mereka menjadi masyarakat yang nasionalis, cinta akan negaranya, tidak ekstrem, dan tidak radikal.

Sinergi pemerintah desa Poncokresno dengan TNI dan Polri juga terjalin sangat baik, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Desa Poncokresno juga dinobatkan sebagai Desa Pancasila oleh Koramil Gedong Tataan, dalam pelaksanaan kegiatan lintas agama dan juga kegiatan apapun itu pihak desa Poncokresno juga selalu melibatkan pihak TNI dan Polri. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran TNI dan Polri merupakan dukungan penuh terhadap

kegiatan positif yang dilaksanakan di Desa Poncokresno, khususnya kegiatan lintas agama.

Babinsa Desa Poncokresno terus melakukan upaya sinergi kepada pihak Desa Poncokresno dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Sebab, kerukunan tidak akan terwujud tanpa adanya ketertiban dan keamanan lingkungan. Oleh karenanya, kehadiran Babinsa TNI sangatlah mendukung terwujudnya masyarakat desa yang sadar kerukunan. Disisi lain, dalam tugasnya Babinsa bermitra dengan Bhabinkamtibmas.

Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibnas sangatlah memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkokoh ketahanan Negara,<sup>36</sup> dalam memperkokoh ketahanan negara tentunya dimulai dari tingkat desa. Jika ketahanan desa terwujud, maka dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga secara nasional akan terwujud. Kemudian, selain dengan pihak keamanan Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno juga bersinergi dengan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Pesawaran yang merupakan wadah tokoh-tokoh lintas agama dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Giarto, S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua FKUB Pesawaran sebagai berikut:

*Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno adalah desa binaan kami selaku FKUB Pesawaran, dua desa tersebut ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan pada bulan 20 Desember 2019 dalam hal ini kami bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, juga bersama TNI, dan Polri. Desa Sadar Kerukunan diberikan kepada dua desa tersebut karena dua desa ini dalam kehidupan sehari-hari memiliki toleransi yang sangat tinggi, mengedepankan gotong royong dan hidup berdampingan secara damai.<sup>37</sup>*

---

<sup>36</sup> Yulius Audie Sonny Latuheru, Rizerius Eko Hadisancoko, dan Lukman Yudho Prakoso, "Optimalisasi Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibnas pada Sambang Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Negara," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (2022): 1806–2997.

<sup>37</sup> H. Giarto (Ketua FKUB Pesawaran), Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, 04 Juli 2023.

FKUB merupakan organisasi yang secara struktural dari tingkat kabupaten atau kota hingga ketingkat nasional. Adapun tugas FKUB yakni sebagai wadah dialog antar pemuka agama, tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat<sup>38</sup> Koordinasi antara FKUB dengan pemerintah sangatlah diperlukan, untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas kehidupan masyarakat beragama. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya FKUB selalu bergandengan dengan Pemerintah, TNI, Polri, Kementerian Agama. Sedangkan pembentukan Desa Sadar Kerukunan merupakan program kerja FKUB Pesawaran.

FKUB Pesawaran sangat serius dalam melaksanakan program kerja Desa Sadar Kerukunan yang didalamnya memuat 6 program, yaitu;

1. Pemberian Santunan Sosial di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno
2. Pembentukan Wadah Komunikasi Tokoh Lintas Agama (KTLA) Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno
3. Sosialisasi dan Pemahaman Serta Implementasi PBM dan Kerukunan Kepada Masyarakat Lintas Agama Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno
4. Program Pensertifikatan Tanah Wakaf dan Tanah Rumah Ibadah Lintas Agama
5. Program Bantuan Ekonomi Lemah Lewat Kerjasama Dengan Dinas Terkait (Sosial, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dll)
6. Implementasi Kerukunan, Gotong royong masyarakat lintas Agama lewat Program Bedah Rumah.<sup>39</sup>

Program kerja desa sadar kerukunan telah terlaksana secara keseluruhan, dari ke 6 poin tersebut yang dilakukan sebagai wadah bertukar pendapat tentang pentingnya kerukunan antarumat beragama adalah pembentukan Komunitas Tokoh Lintas Agama di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno.

---

<sup>38</sup> Ahmad Faqih, "The Role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) for Religious Harmony and the Rights of Freedom of Religion or Belief (FORB)," *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 11, no. 1 (2021): 65–82.

<sup>39</sup> FKUB Pesawaran, *Dokumen Program Kerja FKUB Pesawaran* (Pesawaran: FKUB Pesawaran, 2020).

Pembentukan KTLA tersebut tentunya akan membuat terjalannya komunikasi antar tokoh agama yang ada di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno. Komunikasi antarumat beragama adalah suatu proses dialog antarumat beragama untuk mencari titik temu di antara agama-agama tersebut sehingga memiliki kesepahaman untuk hidup rukun dan damai. Komunikasi antarumat beragama bisa berlangsung secara individu dengan individu lainnya atau secara grup komunikasi.<sup>40</sup> Hal ini tentu berpengaruh terhadap kerukunan antarumat beragama. Sebab, adanya dialog dan musyawarah memungkinkan antar tokoh agama baik di Desa Lumbirejo maupun di Desa Poncokresno.

Forum Pemuda Lintas Agama atau FPLA ini dibentuk sebagai upaya FKUB Pesawaran dalam melakukan kaderisasi terhadap anak muda yang di desanya ini sangat beragam pemeluk agama seperti di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno. Hal ini sangat penting dilakukan karena, walaupun masyarakat saat ini rukun, akan tetapi hal tersebut juga perlu dirawat agar tidak terjadi konflik. Apalagi saat ini generasi muda sangatlah mudah menerima informasi dari media digital yang sangat mempengaruhi karakter seseorang dalam menyikapi toleransi antar agama,<sup>41</sup> apabila dilakukan kaderisasi sebagai bentuk pengarahan maka pemuda lintas agama akan dibentengi oleh pemahaman agama yang moderat.

Kerukunan Antar Umat Beragama juga menjadi tugas sekaligus tanggungjawab Kementerian Agama. Oleh karenanya, dalam mewujudkan desa sadar kerukunan juga terdapat peran Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, sebagaimana hasil wawancara dengan Ahmad Effendi Staff KUB Kemenag Pesawaran, menurutnya; *Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran dalam hal mewujudkan desa yang damai, terutama desa dengan penduduk yang majemuk seperti desa Lumbirejo dan Poncokresno selalu bersinergi dengan FKUB Pesawaran, seperti hanya melakukan dialog antar tokoh lintas agama sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hidup rukun sesuai Bhineka Tunggal*

---

<sup>40</sup> Ujang Saefullah, *Komunikasi Lintas Budaya dan Agama* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2020), 18.

<sup>41</sup> Viarel Elsievana Augesthine et al., "Toleransi Beragama dan Sikap Bijak dalam Mewujudkan Digital Virtue," *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 14, no. 1 (2022): 1–13.

*Ika.Babkan, Kemenag Pesawaran memberikan bantuan operasional 40.000.000 rupiah setiap tahun dalam rangka mendukung penuh program FKUB Pesawaran.*<sup>42</sup>

Sinergi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran dengan FKUB dan Pemerintah Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno dalam bentuk dialog lintas agama, dialog lintas agama ini sangatlah penting dilakukan dalam rangka menjalin hubungan baik antarumat beragama dan sebagai wujud ikhriar keterbukaan antarumat beragama. Selain sinergi secara moril, Kemenag Pesawaran juga memberikan bantuan secara materil berupa dana operasional oleh FKUB Pesawaran guna melaksanakan program kerjanya. Bantuan tersebut menunjukkan betapa seriusnya Kemenag Pesawaran dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, apalagi saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia sedang giat-giatnya mensosialisasikan moderasi beragama<sup>43</sup> di berbagai satuan kerja Kemenag RI, dan saat ini juga telah dibentuk Pusat Kajian Moderasi Beragama diseluruh Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia.<sup>44</sup>

Bahkan, saat ini moderasi beragama telah menjadi program prioritas nasional, yang nantinya tidak hanya disosialisasikan di internal Kemenag RI saja tetapi juga diseluruh *stakeholder* pemerintahan diseluruh Kementerian, TNI, dan Polri. Hal ini mengingat betapa pentingnya pemahaman agama yang moderat, saling menghargai dan tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan yakni nasionalis religius. Moderasi beragama adalah gagasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan saat ini dimatangkan lagi di era Menteri Agama Yaqu Cholil Qoumas.<sup>45</sup> Moderasi beragama ini merupakan bentuk keseriusan negara dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama, oleh karenanya yang

---

<sup>42</sup> Ahmad Ependi (Staff KUB Kemenag Pesawaran), Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, 04 Juli 2023.

<sup>43</sup> Muhammad Aqil Irham, Idrus Ruslan, dan Muhammad Candra Syahputra, "The Idea of Religious Moderation in Indonesian New Order and The Reform Era," *Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2021): 1–22.

<sup>44</sup> Nunu Burhanuddin dan Darul Ilmi, "Typologies of Religious Moderation in Indonesian Higher Education Institutions," *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 02 (2022): 455–479.

<sup>45</sup> Arif Budiarto, "Nahdlatul Ulama, Peradaban dan Perdamaian: Peran Gus Yahya dan Gus Yaquq dalam Pribumisasi Islam Moderat," *Ansoruna: Journal of Islam and Youth Movement* 1, no. 1 (2022): 41–50.

berkenaan dengan hal tersebut maka akan didukung penuh oleh Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran seperti halnya program-program kerjayang dilakukan oleh Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran.

Kemenag Pesawaran dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama tidak hanya bekerjasama dengan FKUB, tetapi juga dengan pemerintah setempat misalnya bekerjasama dengan Pemkab Pesawaran, Polres Pesawaran, Dandim 0421/LS dan tentunya dengan pemerintah desa setempat, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman dan rukun merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara, bukan hanya tugas pemerintah. Sehingga, kerjasama antar masyarakat dan pemerintah harus tetap terjalin sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Perbedaan agama merupakan suatu keniscayaan, akan tetapi hal itu juga akan menjadi boomerang apabila tidak mampu mengelolanya dengan baik. Oleh karenanya sangat penting menjaga dan menahan diri agar tidak terjerumus kepada hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan antarumat beragama hanya karena kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Maka, menjaga kerukunan antarumat beragama adalah tanggungjawab kita bersama.

#### **b. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno**

Masyarakat yang multikultural dan multiagama tentu dalam mewujudkan kehidupan yang rukun terdapat dinamika di dalamnya. Begitu juga dalam mewujudkan Desa Sadar Kerukunan terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses sinergi yang selama ini telah terjalin antara masyarakat dan pemerintah. Adapun faktor pendukung dalam hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ridho selaku Kepala Desa Lumbirejo:

*Faktor pendukung dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap perbedaan telah diwariskan turun temurun, kemudian dalam kegiatan lintas agama kami didukung oleh banyak pihak seperti yang kami*

*sebutkan sebelumnya dari Pemkab, Kemenag, FKUB dan juga ormas keagamaan di Desa Lumbirejo.*<sup>46</sup>

Masyarakat yang memiliki sadar akan keragaman menjadi modal utama dalam mewujudkan desa sadar kerukunan. Sehingga, dapat menjadi faktor pendukung dalam keberlangsungan masyarakat yang rukun antarumat beragama. Selain itu, kerjasama antar pihak juga menjadi faktor pendukung sekaligus penentu keberhasilan dalam mewujudkan Desa Sadar Kerukunan. Selanjutnya, bapak Irwan selaku Sekretaris Desa Poncokresno juga menjelaskan faktor pendukung dalam mewujudkan desa sadar kerukunan :

*Masyarakat Desa Poncokresno ini sangat kompak, toleransi yang tinggi, dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, FKUB saya kira itu yang menjadi faktor pendukung dalam menjadikan Desa Sadar Kerukunan.*<sup>47</sup>

Kekompakan merupakan cerminan dari persatuan, yakni pengamalan sila ke-3 Pancasila. Masyarakat yang kompak akan sulit dipecah belah, selanjutnya masyarakat yang toleran (saling menghargai) menjadi modal penting bagi terwujudnya Desa Sadar Kerukunan. Dukungan dari pemerintah juga menjadi faktor pendukung yang dapat membantu terealisasinya Desa Sadar Kerukunan. Selain itu, dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang menghambat sebagai berikut:

*Penghambatnya saya kira saat tahun-tahun politik, di beberapa kesempatan di acara desa maupun acara keagamaan atau lintas agama, selalu saya sampaikan jangan sampai perbedaan pilihan dapat membuat kita terpecah, dan saya juga mengajak untuk menahan diri, jangan sampai ikut-ikutan politisasi agama. Itu bahaya, apalagi hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.*<sup>48</sup>

Kepentingan politik menjadi salah satu kendala bagi terwujudnya kerukunan antarumat beragama. Apalagi jika terlalu larut

---

<sup>46</sup> Ridho (Kepala Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

<sup>47</sup> Irwan (Sekretaris Desa Poncokresno), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

<sup>48</sup> Ridho (Kepala Desa Lumbirejo), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

dan fanatic terhadap calon tertentu. Ada banyak kasus, terutama politisasi agama ini sangat mencederai kehidupan umat beragama.<sup>49</sup> Hal ini sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu pentingnya kesadaran bahwa, pemilu baik pilpres, pilkada, pileg adalah ajang untuk memilih pemimpin. Selanjutnya maka selesai, dan tidak adalagi perdebatan, siapapun yang terpilih maka itulah pemimpin yang terbaik pilihan rakyat. Kemudian, faktor penghambat yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Poncokresno dalam mewujudkan desa sadar kerukunan yaitu:

*Penghambatnya ini yang saya lihat itu justru sosial media pak, sosial media atau teknologi digital ini sebuah kemajuan, tapi generasi muda saat ini banyak meniru budaya-budaya luar yang mereka dapat dari sosial media, yang mengkhawatirkan lagi jika mereka menonton konten-konten agama yang radikal ini menurut saya penghambatnya, dikhawatirkan akan mempengaruhi anak muda sebagai generasi masa depan desa ini.<sup>50</sup>*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian, hal itu ibarat pisau bermata ganda, satu sisi bernilai positif disisi lain dapat menimbulkan hal yang negatif. Akses yang terbuka memudahkan kita untuk mencari informasi apapun di media sosial atau internet. Akan tetapi, tidak semua akses informasi tersebut bernilai positif apabila kita tidak bisa memfilter maka akan dengan mudah terpengaruh berita bohong atau hoax, dan kemudian konten-konten keagamaan yang ada di sosial media juga tidak semuanya bermuatan pesan agama yang moderat. Pemahaman radikal juga banyak disebarkan melalui media sosial.<sup>51</sup> Oleh karena itu, stakeholder terkait baik Kemenag maupun FKUB kiranya dapat melakukan penyuluhan ataupun pelatihan literasi digital sebagai bekal anak muda lintas agama dalam memanfaatkan media sosial.

---

<sup>49</sup> Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia," *MAARIF* 13, no. 2 (2018): 43–54.

<sup>50</sup> Irwan (Sekretaris Desa Poncokresno), Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, 20 Juni 2023.

<sup>51</sup> Iman Fauzi Ghifari, "Radikalisme di Internet," *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1, no. 2 (2017): 123–134.

FKUB Pesawaran sebagai pelaksana program kerja Desa Sadar Kerukunan juga menjelaskan adanya faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya sebagai wadah tokoh lintas agama di Kabupaten Pesawaran:

*Berbicara faktor penghambat, tentu hal itu kami rasakan. Kami sebagai organisasi yang memiliki tujuan agar terciptanya masyarakat se-Kabupaten Pesawaran yang rukun antarumat beragama. Untuk merealisasikan itu tentunya perlu adanya operasional yang memadai, dalam hal ini kami selalu mendapatkan bantuan operasional dari Kemenag setiap tahunnya, harapan yang sama juga hal itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran supaya kami diberikan bantuan operasional agar dapat menjangkau seluruh Kabupaten Pesawaran, yang mana titik-titik rawan terjadinya konflik antarumat beragama ini tidak hanya di satu atau dua desa, di Tegineneng misalnya, terus di Hanura dan banyak lagi. Harapan kami dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten bukan hanya secara moral tetapi juga secara materil. Karena, kami telah melakukan study banding di beberapa FKUB Kabupaten, Kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Mereka dapat dengan massif merealisasikan program kerjanya atas bantuan dari pemerintah setempat.<sup>52</sup>*

Pendanaan operasional FKUB Pesawaran menjadi faktor kendala dalam mewujudkan Desa Sadar Kerukunan dan lebih luasnya dalam mewujudkan masyarakat yang rukun antar umat beragama. Hal ini menjadi penting, sebab realisasi program kerja juga membutuhkan operasional yang tidak sedikit, sehingga bantuan operasional dari pemerintah kabupaten sangat diharapkan, apalagi bantuan operasional ini digunakan untuk kepentingan warga masyarakat Kabupaten Pesawaran.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan: 1). Kondisi kehidupan antarumat beragama di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno sangat menjunjung tinggi toleransi, menghargai, dan

---

<sup>52</sup> H. Giarto (Ketua FKUB Pesawaran), Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, 30 Oktober 2023.

menjaga satu sama lain dalam kehidupan beragama secara khusus maupun secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno senantiasa menjaga kekompakan antarumat beragama dalam berbagai kegiatan seperti halnya perayaan Idul Fitri umat agama yang lain membantu melakukan pengamanan masjid-masjid desa begitupun sebaliknya; 2). Pemerintah Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno mendukung penuh kegiatan lintas agama dengan cara memfasilitasi kegiatan keagamaan masing-masing agama, membuka selebar-lebarnya kerjasama kepada semua pihak yang ingin melakukan penyuluhan keagamaan. Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan desa sadar kerukunan melibatkan antara lain Pemerintah Desa Lumbirejo dan Poncokresno, FKUB Pesawaran, Kemenag Pesawaran, Pemkab Pesawaran, TNI dan Polri. Sinergi ini dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga dan merawat kerukunan di Desa Lumbirejo dan Desa Poncokresno. 3). Faktor pendukung dalam mewujudkan desa sadar kerukunan antarumat beragama antara lain masyarakat yang sadar akan perbedaan, kompak, dan toleran menjadi modal utama dalam menjalin kehidupan yang harmoni, selanjutnya dukungan dari pihak terkait seperti FKUB Pesawaran, Kemenag Pesawaran, Pemkab Pesawaran, TNI dan Polri yang juga merupakan faktor pendukung. Adapun faktor penghambatnya yakni kepentingan politik yang dapat memecah belah persatuan, dan bantuan operasional pemerintah terhadap FKUB Pesawaran yang masih sangat terbatas menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan Desa Sadar Kerukunan khususnya, dan kerukunan antarumat beragama se-Kabupaten Pesawaran pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- Alfazri, M. "Moderasi Agama Nahdlatul 'Ulama di Era Global." *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 1 (2021): 41–58.
- Al Qurtuby, Sumanto. "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia." *MAARIF* 13, no. 2 (2018): 43–54.
- Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme." *Politica* 11, no. 1 (2020): 43–63.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Augesthine, Viarel Elsievana, Anita Trisiana, Najwa Sayyidina, dan Innayah Quljannah. "Toleransi Beragama dan Sikap Bijak dalam Mewujudkan Digital Virtue." *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 14, no. 1 (2022): 1–13.
- Aziz, M Asrul. "Revitalisasi Bhabinkamtibnas dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa." *Jurnal Litbang Polri* 23, no. 1 (2020): 64–83.
- Bagir, Zainal Abidin, AA GN Ari Dwipayana, Mustaghfiroh Rahayu, Trisno Sutanto, dan Farid Wajidi. *Pluralisme Kewargaan: Arab Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: CRCS UGM dan Mizan, 2011.
- Budianto, Arif. "Nahdlatul Ulama, Peradaban dan Perdamaian: Peran Gus Yahya dan Gus Yaqut dalam Pribumisasi Islam Moderat." *Ansoruna: Journal of Islam and Youth Movement* 1, no. 1 (2022): 41–50.
- Burhanuddin, Nunu, dan Darul Ilmi. "Typologies of Religious Moderation in Indonesian Higher Education Institutions." *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 02 (2022): 455–479.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Faqih, Ahmad. "The Role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) for Religious Harmony and the Rights of Freedom of Religion or Belief (FORB)." *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 11,

no. 1 (2021): 65–82.

FKUB Pesawaran. *Dokumen Program Kerja FKUB Pesawaran*. Pesawaran: FKUB Pesawaran, 2020.

Ghifari, Iman Fauzi. “Radikalisme di Internet.” *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1, no. 2 (2017): 123–134.

Ginting, Rosalina, dan Kiki Aryaningrum. “Toleransi dalam Masyarakat Plural.” *Majalah Lontar* 23, no. 4 (2009): 1–7.

Harahap, Sumper Mulia, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Darwis Harahap. “Tracing The Dynamic Spectrum of Religious Moderation in The Local Custom of North Sumatera.” *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (2023): 65–102.

Hilmy, Masdar. “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism?: A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU.” *Journal of Indonesian Islam* 07, no. 01 (2013): 24–48.

Irhama, Muhammad Aqil, Idrus Ruslan, dan Muhammad Candra Syahputra. “The Idea of Religious Moderation in Indonesian New Order and The Reform Era.”, *Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2021): 1–22.

Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Latuheru, Yulius Audie Sonny, Rizerius Eko Hadisancoko, dan Lukman Yudho Prakoso. “Optimalisasi Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibnas pada Sambang Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Negara.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (2022): 1806–2997.

Levang, Patrice. *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.

Mu’ti, Abdul, dan Azaki Khoiruddin. *Pluralisme Positif: Konsep dan Implementasi dalam Pendidikan Muhammadiyah*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

Nurhadi, Zikri Fachrul, Ummu Salamah, Olih Solihin, dan Sahra Berlianti. “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam

- Mensosialisasikan Moderasi Beragama.” *Alhadbarah: Jurnal Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2023): 63–79.
- Qasim, Muhammad. *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Rahmat, Hayatul Khairul, Joshua Banjarhanor, Nurbaiti Marfuah, dan I Dewa Ketut Kerta Widana. “Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): 91–107.
- Riyadi, M. Irfan, dan Basuki. *Membangun Inklusivisme Pabam Keagamaan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Ruslan, Idrus. “Deconstruction of the Policy for the Establishment of Houses of Worship in Indonesia.” *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 6, no. 2 (2022): 261–270.
- Ruslan, Idrus, dan Kiki Muhammad Hakiki. “Politik Identitas dan Tantangan Hubungan Antar Agama di Indonesia.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 17, no. 2 (2022): 201–222.
- Ruslan, Idrus, dan Muhammad Aqil Irham. “The Role of Cultural Literacy and Peace Education in Harmonization of Religious Communities.” *Journal of Social Studies Educational Research* 13, no. 3 (2022): 174–204.
- Saefullah, Ujang. *Komunikasi Lintas Budaya dan Agama*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2020.
- Setyowati, Eni. “Hijrah Menuju Sehat yang Islami.” In *Moderasi Beragama: Perubahan Orientasi Keberagamaan Umat Islam Indonesia*, diedit oleh Abd. Azis Tata Pangarsa. Gresik: Sahabat Pena Kita, 2020.
- Situmorang, Victorio H. “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 57–68.
- Sumbulah, Umi. “Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Kontruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi.” IAIN Sunan Ampel, 2006.
- Suparlan, Parsudi. “Masyarakat Majemuk dan Perawatannya.” In

*Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia*, 42–50. Makassar, 2000.

Syahputra, Muhammad Candra. “Pendidikan Multikultural dalam Budaya Nemui Nyimah.” *eL-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 81–97.